

Peran Kepala Desa dalam Penanggulangan Kekeringan Pertanian: Studi Kasus Desa Pusakajaya Utara, Karawang

Firman Manggala^{1*}; Evi Priyanti²

^{1,2} Universitas Singaperbangsa Karawang, Karawang, Indonesia

*Correspondence : 2210631180136@student.unsika.ac.id

Date of submission: 27 June 2026 | Date of acceptance: 18 August 2026

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran Kepala Desa dalam menanggulangi kekeringan pada lahan pertanian sawah di Desa Pusakajaya Utara Kecamatan Cilebar Kabupaten Karawang. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Informan penelitian dipilih menggunakan teknik *purpose sampling* yaitu terdiri atas Kepala Desa, perangkat desa, ketua kelompok tani, Ketua Kelompok Tani, Ketua Pertanian Lapangan (PPL) dan masyarakat petani. Pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Analisis data dilakukan melalui reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Keabsahan data dilakukan melalui triangulasi sumber, triangulasi teknik dan *member check*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kepala Desa telah menjalankan perannya dalam penanggulangan kekeringan melalui koordinasi dengan kelompok tani, Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A), dan instansi terkait, menggerakkan partisipasi masyarakat dalam kegiatan gotong royong pemeliharaan saluran irigasi, memfasilitasi pembangunan turap pada jaringan irigasi tersier, serta menyampaikan kebutuhan petani kepada pemerintah yang berwenang. Meskipun demikian, pelaksanaan peran tersebut belum sepenuhnya optimal karena dipengaruhi oleh keterbatasan kewenangan pemerintah desa, kondisi jaringan irigasi, serta letak Desa Pusakajaya Utara yang berada pada wilayah hilir sehingga pasokan air sering kali tidak mencukupi pada musim kemarau.

ABSTRACT

This study aims to analyze the role of the Village Head in mitigating drought affecting paddy fields in Pusakajaya Utara Village, Cilebar District, Karawang Regency. The study employed a qualitative approach using a descriptive case study design. Informants were selected through purposive sampling and consisted of the Village Head, village officials, leaders of farmer groups, agricultural extension officers, and farmers. Data were collected through observation, in-depth interviews, and documentation, then analyzed using data reduction, data display, and conclusion drawing. The validity of the findings was ensured through source triangulation, technique triangulation, and member checking. The findings indicate that the Village Head has carried out various roles in drought mitigation by coordinating with farmer groups, Water User Farmers Associations (P3A), and relevant government agencies, organizing community participation in irrigation maintenance, facilitating the construction of tertiary irrigation infrastructure, and communicating farmers' needs to higher authorities. However, these efforts have not fully addressed recurring drought due to limited institutional authority, inadequate irrigation management, and the geographical position of the village in the downstream irrigation area.

Kata Kunci

Peran kepala desa, Kekeringan, Lahan Pertanian sawah, Tata Kelola Desa, Irigasi.

Keywords

Village Head Role, Drought Mitigation, Paddy Fields, Village Governance, Irrigation Management.

Pendahuluan

Kekeringan menjadi salah satu persoalan yang cukup serius dalam kegiatan pertanian di Indonesia. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (2023), Setiap tahun ketika memasuki musim kemarau, banyak daerah mengalami pengurangan pasokan air untuk lahan sawah. Kondisi ini tidak hanya berdampak pada produktivitas pertanian, tetapi juga memengaruhi ketahanan pangan masyarakat desa. Dalam konteks pedesaan, pertanian masih menjadi sumber mata pencaharian utama, sehingga gangguan pada ketersediaan air dapat menurunkan pendapatan petani dan menghambat keberlangsungan kegiatan pertanian (Bramantyo, 2022).

Permasalahan kekeringan di tingkat Desa tidak hanya disebabkan oleh faktor cuaca, tetapi juga dipengaruhi oleh kondisi infrastruktur irigasi. Data dari Kementerian Pekerjaan Umum (2025), menunjukkan bahwa masih terdapat jaringan irigasi yang mengalami kerusakan akibat kurangnya pemeliharaan. Selain itu, penyumbatan saluran oleh sedimentasi, sampah, dan eceng gondok juga menjadi faktor yang menghambat distribusi air ke lahan pertanian. Hal ini menunjukkan bahwa kekeringan juga berkaitan dengan tata kelola dan pengelolaan irigasi di tingkat desa (Mardiana & Nurcahyani, 2023). Kondisi tersebut menunjukkan bahwa persoalan kekeringan tidak hanya berkaitan dengan faktor alam, tetapi juga dipengaruhi oleh tata kelola dan pemeliharaan infrastruktur irigasi di tingkat lokal. Oleh karena itu, diperlukan peran aktif Kepala Desa dalam memastikan saluran irigasi tetap berfungsi dengan baik melalui kegiatan pemeliharaan serta koordinasi dengan berbagai pihak terkait.

Kabupaten Karawang dikenal sebagai salah satu lumbung padi nasional yang memiliki peran penting dalam produksi beras di Indonesia. Hal ini sejalan dengan data Badan Pusat Statistik yang menunjukkan bahwa produksi padi nasional pada tahun 2023 mencapai sekitar 53,98 juta ton gabah kering giling (GKG), di mana Provinsi Jawa Barat termasuk Kabupaten Karawang menjadi salah satu kontributor utama produksi tersebut (Wangguli, Hatu, Tamu, & Bumulo, 2025).

Penelitian mengenai peran kepala desa dalam penanggulangan kekeringan telah banyak dilakukan dalam berbagai konteks pembangunan desa. (D.F, L.M, & W, 2021) menjelaskan bahwa kepala desa berperan sebagai fasilitator, pengambil keputusan, dan penggerak partisipasi masyarakat dalam menghadapi bencana kekeringan melalui koordinasi antaraktor serta pemanfaatan sumber daya desa. Sementara itu, (Akbar, 2022) menunjukkan bahwa kepemimpinan kepala desa yang partisipatif mampu meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur irigasi sebagai salah satu upaya mengurangi dampak kekeringan. Temuan tersebut menunjukkan bahwa kepala desa memiliki posisi strategis dalam mendorong partisipasi masyarakat dan mendukung pelaksanaan pembangunan desa (Widya, 2025) .

Meskipun demikian, penelitian-penelitian tersebut masih memiliki beberapa keterbatasan. Sebagian besar penelitian lebih menitikberatkan pada deskripsi

bentuk peran kepala desa dalam penanganan kekeringan atau pembangunan infrastruktur tanpa menganalisis bagaimana peran tersebut dijalankan berdasarkan dimensi konseptual teori Peran Suhardono. Akibatnya, hubungan antara tindakan kepala desa, pelaksanaan kewenangan, evaluasi terhadap program, proses koordinasi, serta mekanisme pembinaan masyarakat belum dianalisis secara utuh dalam satu kerangka teoritis. Dengan kata lain, penelitian terdahulu lebih banyak menggambarkan apa yang dilakukan kepala desa dibandingkan menjelaskan bagaimana peran tersebut diwujudkan menurut perspektif teori peran (Bahtiar, 2023).

Selain itu, penelitian terdahulu umumnya dilakukan pada wilayah dengan karakteristik yang berbeda dengan Desa Pusakajaya Utara. Desa ini berada pada bagian hilir jaringan irigasi sehingga memiliki tingkat kerentanan yang lebih tinggi terhadap keterlambatan distribusi air pada musim kemarau. Kondisi tersebut menyebabkan penanganan kekeringan tidak hanya dipengaruhi oleh faktor alam, tetapi juga oleh koordinasi antarlembaga, keterbatasan kewenangan pemerintah desa dalam pengelolaan jaringan irigasi, serta partisipasi masyarakat dalam menjaga saluran irigasi. Karakteristik tersebut memberikan konteks yang berbeda dibandingkan penelitian sebelumnya sehingga perlu dikaji secara lebih mendalam.

Berdasarkan uraian tersebut, terdapat kesenjangan penelitian berupa masih terbatasnya penelitian yang menganalisis peran kepala desa dalam penanggulangan kekeringan menggunakan teori Peran Suhardono secara komprehensif melalui lima dimensi, yaitu aksi (*action*), patokan (*prescription*), penilaian (*evaluation*), paparan (*description*), dan sanksi (*sanction*). Sementara itu, *empirical gap* ditunjukkan oleh masih terjadinya kekeringan yang berulang di Desa Pusakajaya Utara meskipun pemerintah desa telah melakukan berbagai upaya penanganan melalui koordinasi, fasilitasi, dan pemberdayaan masyarakat. Kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara pelaksanaan peran pemerintah desa dengan hasil yang dicapai dalam mengatasi permasalahan kekeringan.

Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Kepala Desa dalam menanggulangi kekeringan pada lahan pertanian sawah di Desa Pusakajaya Utara, Kecamatan Cilebar, Kabupaten Karawang menggunakan teori Peran Suhardono. Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi ilmiah dalam memperkaya kajian mengenai teori peran pada konteks tata kelola kekeringan di tingkat desa serta memberikan kontribusi praktis sebagai masukan bagi pemerintah desa dalam memperkuat koordinasi, pemberdayaan masyarakat, dan kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan dalam penanganan kekeringan.

Metode

Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif serta pendekatan studi kasus. Penelitian kualitatif-deskriptif digunakan untuk menggambarkan dan memahami secara mendalam fenomena

sosial yang terjadi secara alamiah tanpa adanya perlakuan atau manipulasi terhadap objek yang diteliti, khususnya mengenai peran pemerintah desa dalam menanggulangi kekeringan pada lahan pertanian sawah di Desa Pusakajaya Utara.

Desain studi kasus dipilih karena penelitian difokuskan pada satu kasus tertentu, yaitu peran Kepala Desa dalam menanggulangi kekeringan di Desa Pusakajaya Utara, Kecamatan Cilebar, Kabupaten Karawang. Pemilihan studi kasus didasarkan pada karakteristik wilayah penelitian yang memiliki kondisi khusus sebagai daerah hilir jaringan irigasi sehingga permasalahan kekeringan dipengaruhi oleh faktor geografis, tata kelola irigasi, serta koordinasi antaraktor. Menurut Yin (2018), studi kasus digunakan untuk mengkaji suatu fenomena secara mendalam dalam konteks kehidupan nyata ketika batas antara fenomena dan konteksnya tidak terlihat secara jelas. Oleh karena itu, pendekatan studi kasus dinilai tepat untuk memahami secara komprehensif bagaimana Kepala Desa menjalankan perannya dalam menghadapi permasalahan kekeringan.

Penelitian dilaksanakan di Desa Pusakajaya Utara, Kecamatan Cilebar, Kabupaten Karawang, karena desa tersebut merupakan salah satu wilayah yang mengalami kekeringan pada lahan pertanian sawah akibat keterbatasan distribusi air irigasi. Proses penelitian dilaksanakan selama bulan Desember 2025 sampai April 2026 yang meliputi tahap observasi awal, pengumpulan data melalui wawancara dan dokumentasi, hingga proses verifikasi data di lapangan.

Dalam penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling* di mana pemilihan informan secara sengaja berdasarkan pertimbangan bahwa informan tersebut memiliki pengetahuan dan pengalaman yang relevan dengan permasalahan penelitian. Adapun informan dalam penelitian ini meliputi Kepala Desa, perangkat desa, ketua kelompok tani, penyuluhan pertanian lapangan (PPL) kecamatan, petani pemilik sawah dan petani buruh atau masyarakat non-petani.

Tabel 1. Penentuan Informan

Informan	Jumlah Informan
Kepala Desa Pusakajaya Utara	1
Perangkat desa	2
Ketua kelompok tani	2
Penyuluh pertanian dari UPTD Pertanian Kecamatan	1
Petani pemilik sawah	2
Petani buruh atau masyarakat non-petani	2

Sumber: Desa Pusakajaya Utara, 2025.

Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Observasi dilakukan untuk memperoleh gambaran nyata mengenai kondisi lahan pertanian, jaringan irigasi, serta aktivitas pemerintah desa dalam penanganan kekeringan. Wawancara dilakukan secara semi-terstruktur menggunakan pedoman wawancara yang disusun berdasarkan lima dimensi teori Peran Suhardono, sehingga peneliti tetap memiliki keleluasaan menggali informasi

secara mendalam sesuai jawaban informan. Setiap wawancara berlangsung sekitar 45–90 menit, disesuaikan dengan ketersediaan waktu dan kedalaman informasi yang diberikan oleh masing-masing informan. Dokumentasi dilakukan melalui pengumpulan foto kegiatan, dokumen desa, laporan, serta data pendukung lain yang berkaitan dengan penanganan kekeringan.

Analisis data menggunakan model interaktif Miles, Huberman, dan Saldaña (2014), yang meliputi kondensasi data (*data condensation*), penyajian data (*data display*), serta penarikan dan verifikasi kesimpulan (*drawing and verifying conclusions*). Pada tahap kondensasi data, peneliti menyeleksi, mengelompokkan, dan menyederhanakan data hasil observasi, wawancara, serta dokumentasi sesuai fokus penelitian. Selanjutnya, data disajikan dalam bentuk uraian naratif yang disusun berdasarkan lima dimensi teori Peran Suhardono agar memudahkan proses interpretasi. Tahap terakhir dilakukan dengan menarik kesimpulan melalui proses verifikasi secara terus-menerus hingga diperoleh temuan yang konsisten dan didukung oleh berbagai sumber data.

Untuk menjamin keabsahan data, penelitian ini menerapkan triangulasi sumber, triangulasi teknik, dan *member checking*. Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan informasi yang diperoleh dari Kepala Desa, perangkat desa, kelompok tani, PPL, dan petani. Triangulasi teknik dilakukan melalui perbandingan hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi. Selanjutnya, *member checking* dilakukan dengan mengonfirmasi kembali hasil wawancara kepada informan untuk memastikan bahwa data yang diperoleh sesuai dengan informasi yang mereka maksudkan.

Hasil dan Pembahasan

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Kepala Desa dalam menanggulangi kekeringan pada lahan pertanian sawah di Desa Pusakajaya Utara Kabupaten Karawang. Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa permasalahan kekeringan masih menjadi salah satu kendala yang dihadapi petani di Desa Pusakajaya Utara, terutama pada musim kemarau. Kondisi tersebut dipengaruhi oleh letak desa yang berada pada wilayah hilir jaringan irigasi sehingga pasokan air yang diterima sering kali tidak mencukupi kebutuhan lahan pertanian. Selain itu, kondisi saluran irigasi yang mengalami penyumbatan akibat eceng gondok, sampah, dan sedimentasi turut memengaruhi kelancaran distribusi air menuju area persawahan. Dalam menghadapi kondisi tersebut, Kepala Desa bersama pemerintah desa telah melakukan berbagai upaya, baik melalui tindakan langsung di lapangan, koordinasi dengan kelompok tani dan instansi terkait, maupun pelaksanaan kegiatan yang mendukung kelancaran jaringan irigasi. Namun demikian, hasil penelitian juga menunjukkan bahwa masih terdapat berbagai hambatan yang menyebabkan upaya penanganan kekeringan belum sepenuhnya berjalan optimal.

Untuk menganalisis peran Kepala Desa dalam menanggulangi kekeringan pada lahan pertanian sawah, penelitian ini menggunakan teori peran menurut Suhardono yang meliputi lima indikator, yaitu aksi (*action*), patokan (*prescription*), penilaian (*evaluation*), paparan (*description*), dan sanksi (*sanction*).

1. Aksi

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Desa Pusakajaya Utara, diketahui bahwa pemerintah desa telah melakukan berbagai upaya untuk membantu masyarakat menghadapi kekeringan. Upaya tersebut dilakukan melalui kegiatan gotong royong membersihkan saluran irigasi, koordinasi dengan kelompok tani, serta penyampaian laporan kepada pihak terkait ketika terjadi gangguan distribusi air.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Desa Pusakajaya Utara pada tanggal 04 Mei 2026. Ia menjelaskan bahwa:

"Ketika terjadi kekeringan kami mengajak masyarakat dan kelompok tani untuk melakukan pembersihan saluran irigasi yang tersumbat. Selain itu kami juga berkoordinasi dengan pihak kecamatan maupun instansi pertanian apabila terdapat permasalahan yang tidak dapat diselesaikan di tingkat desa."

Pernyataan tersebut diperkuat oleh Sekretaris Desa, Kepala Urusan Perencanaan, dan Kepala Dusun yang menyatakan bahwa pemerintah desa selama ini berupaya terlibat dalam kegiatan yang berkaitan dengan penanganan kekeringan. Adapun hasil wawancara yang dilakukan pada tanggal 06 Mei 2026 salah satu perangkat desa menyampaikan bahwa:

"Pemerintah desa selalu berusaha hadir ketika ada kegiatan pembersihan saluran irigasi. Kami ikut mengajak masyarakat untuk bergotong royong membersihkan sampah dan eceng gondok yang menghambat aliran air. Selain itu kondisi yang terjadi di lapangan juga kami laporkan kepada kepala desa agar dapat ditindaklanjuti."

Pandangan yang hampir sama juga disampaikan oleh Ketua Kelompok Tani, Ketua P3A, dan Penyuluh Pertanian Lapangan Kecamatan Cilebar. Menurut mereka, pemerintah desa cukup aktif dalam menggerakkan masyarakat untuk melakukan kerja bakti ketika kondisi saluran mulai mengalami penyumbatan. Hasil wawancara yang dilakukan pada kelompok tani pada tanggal 05 Mei 2026 ia menyampaikan bahwa:

"Kalau saluran mulai banyak eceng gondok biasanya pemerintah desa mengajak kelompok tani dan masyarakat untuk melakukan kerja bakti. Pemerintah desa juga ikut membantu koordinasi apabila diperlukan alat atau bantuan dari pihak lain."

Meskipun demikian, petani menunjukkan bahwa tindakan yang dilakukan Kepala Desa masih belum sepenuhnya mampu mengatasi permasalahan kekeringan yang terjadi setiap tahun. Hasil wawancara dengan Bapak T petani pemilik sawah pada tanggal 04 Mei 2026, ia menyampaikan bahwa:

"Kepala desa memang pernah mengajak masyarakat untuk membersihkan saluran irigasi bersama-sama, terutama ketika kondisi air mulai sulit masuk ke sawah. Akan tetapi kegiatan seperti itu belum dilakukan secara rutin sehingga kadang saluran kembali dipenuhi eceng gondok dan sampah yang membuat aliran air tidak lancar."

Berdasarkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi yang diperoleh selama penelitian, diketahui bahwa pemerintah Desa Pusakajaya Utara telah melakukan berbagai tindakan nyata dalam upaya menanggulangi kekeringan pada lahan pertanian sawah. Bentuk tindakan tersebut diwujudkan melalui kegiatan gotong royong pembersihan saluran irigasi, koordinasi dengan kelompok tani dan masyarakat, pemantauan kondisi saluran irigasi, serta penyampaian laporan kepada pihak terkait apabila ditemukan hambatan yang tidak dapat ditangani oleh pemerintah desa.

Temuan penelitian pada dimensi aksi menunjukkan bahwa peran Kepala Desa Pusakajaya Utara telah diwujudkan melalui berbagai tindakan konkret dalam merespons permasalahan kekeringan, seperti menggerakkan gotong royong pembersihan saluran irigasi, berkoordinasi dengan kelompok tani dan P3A, menyampaikan kondisi kekurangan air kepada instansi terkait, serta mendukung kegiatan pemeliharaan dan perbaikan jaringan irigasi pada tingkat yang dapat dijangkau oleh pemerintah desa. Dalam perspektif teori Peran Suhardono, tindakan tersebut memperlihatkan bahwa peran tidak berhenti pada kedudukan formal seorang kepala desa, tetapi diwujudkan melalui aktivitas nyata yang dilakukan dalam menghadapi tuntutan dan permasalahan yang muncul di lingkungan masyarakat. Dengan demikian, keberadaan Kepala Desa dalam penanggulangan kekeringan dapat dipahami sebagai aktor yang menerjemahkan kedudukannya ke dalam tindakan koordinatif, fasilitatif, dan mobilisasi sosial.

Temuan tersebut sejalan dengan penelitian D.F et al. (2021) yang menjelaskan bahwa pemerintah desa memiliki peran sebagai fasilitator, pengambil keputusan, dan penggerak partisipasi masyarakat dalam menghadapi bencana kekeringan. Kesamaan tersebut terutama terlihat pada keterlibatan pemerintah desa dalam menggerakkan masyarakat serta menghubungkan kebutuhan masyarakat dengan pihak lain yang memiliki sumber daya maupun kewenangan lebih besar. Temuan penelitian ini juga mendukung Akbar (2022) yang menunjukkan bahwa kepemimpinan kepala desa yang partisipatif dapat mendorong keterlibatan masyarakat dalam pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur irigasi. Dalam konteks Desa Pusakajaya Utara, gotong royong membersihkan saluran irigasi memperlihatkan bahwa tindakan kepala desa tidak dilaksanakan secara individual, melainkan melalui pengorganisasian partisipasi masyarakat sebagai bagian dari penanganan kekeringan.

Meskipun demikian, penelitian ini menemukan bahwa tindakan pemerintah desa masih cenderung bersifat responsif dibandingkan preventif. Pembersihan saluran, koordinasi, dan mobilisasi masyarakat umumnya semakin intensif ketika gangguan aliran air mulai dirasakan atau ketika kondisi saluran telah mengalami penyumbatan. Pola tersebut menyebabkan manfaat tindakan pemerintah desa lebih banyak terlihat pada pengurangan dampak permasalahan dalam jangka pendek daripada pencegahan kekeringan secara berkelanjutan. Temuan ini memperlihatkan

bahwa keberadaan tindakan nyata belum secara otomatis menunjukkan tingginya efektivitas suatu peran. Efektivitas tindakan juga ditentukan oleh kontinuitas pemeliharaan, kecepatan koordinasi, ketersediaan sumber daya, dan kewenangan aktor yang terlibat.

Kondisi tersebut sekaligus memperjelas karakter peran Kepala Desa Pusakajaya Utara. Kepala Desa bukan merupakan aktor yang memiliki kewenangan teknis penuh untuk mengendalikan keseluruhan jaringan irigasi, terutama jaringan primer dan sekunder. Oleh karena itu, tindakan yang dapat dilakukan lebih dominan dalam bentuk fasilitasi, koordinasi, mobilisasi masyarakat, dan penyampaian kebutuhan petani kepada lembaga yang berwenang. Hal ini relevan dengan kajian Haryo Praseno dan Mahendra (2021) mengenai peran pemerintah desa dalam penanggulangan kekeringan, yang menempatkan pemerintah desa sebagai bagian penting dari proses penanganan masalah di tingkat lokal. Dengan demikian, dimensi aksi dalam penelitian ini menunjukkan bahwa efektivitas peran Kepala Desa tidak hanya ditentukan oleh seberapa banyak tindakan dilakukan, tetapi juga oleh kemampuan menghubungkan tindakan lokal dengan dukungan kelembagaan di luar pemerintah desa.

2. Patokan

Kesesuaian peran pemerintah desa dengan harapan masyarakat dilihat dari sejauh mana upaya yang dilakukan pemerintah Desa Pusakajaya Utara dalam menanggulangi kekeringan telah memenuhi kebutuhan dan harapan petani serta masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Desa Pusakajaya Utara, diketahui bahwa pemerintah desa berupaya memenuhi harapan masyarakat melalui koordinasi dengan kelompok tani, pelaksanaan kegiatan gotong royong, serta penyampaian berbagai usulan masyarakat kepada instansi terkait yang memiliki kewenangan dalam pengelolaan irigasi.

Sebagian harapan masyarakat telah diupayakan oleh pemerintah desa melalui berbagai kegiatan yang dilakukan. Namun demikian, masih terdapat beberapa harapan yang belum sepenuhnya terpenuhi, terutama yang berkaitan dengan pemeliharaan saluran irigasi secara berkelanjutan dan optimalisasi distribusi air ke lahan pertanian.

Berdasarkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi yang diperoleh selama penelitian, diketahui bahwa pemerintah Desa Pusakajaya Utara telah berupaya menjalankan perannya sesuai dengan harapan masyarakat melalui kegiatan koordinasi, fasilitasi aspirasi petani, serta keterlibatan dalam penanganan permasalahan kekeringan. Upaya tersebut menunjukkan adanya komitmen pemerintah desa dalam membantu masyarakat menghadapi dampak kekeringan.

Namun demikian, hasil penelitian menunjukkan bahwa masih terdapat kesenjangan antara harapan masyarakat dan kondisi yang dirasakan di lapangan. Masyarakat mengharapkan adanya penanganan yang lebih berkelanjutan, terutama

terkait pemeliharaan saluran irigasi dan upaya pencegahan kekeringan. Sementara itu, kegiatan yang dilakukan pemerintah desa masih cenderung berfokus pada penanganan ketika permasalahan telah terjadi.

Pada dimensi patokan, hasil penelitian memperlihatkan adanya hubungan antara kewajiban yang melekat pada kedudukan Kepala Desa, harapan masyarakat, dan batas kewenangan formal yang dimiliki pemerintah desa. Masyarakat, khususnya petani, menempatkan Kepala Desa sebagai pihak yang diharapkan dapat memberikan respons terhadap kekeringan, memastikan kelancaran saluran irigasi, serta membantu menyampaikan kebutuhan air pertanian kepada instansi terkait. Harapan tersebut muncul karena Kepala Desa merupakan pemimpin pemerintahan yang paling dekat dengan masyarakat dan dipandang memiliki kapasitas untuk mengoordinasikan sumber daya di tingkat lokal. Dalam perspektif Suhardono, kondisi tersebut mencerminkan dimensi patokan karena suatu peran tidak hanya ditentukan oleh tindakan individu, tetapi juga oleh norma, kewajiban, dan harapan yang melekat pada posisi sosial yang ditempatinya.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kepala Desa telah berusaha memenuhi patokan tersebut melalui koordinasi, fasilitasi aspirasi petani, dukungan terhadap pemeliharaan irigasi, serta komunikasi dengan berbagai pihak terkait. Temuan ini memiliki keterkaitan dengan penelitian Suryandari dan Isbandono (2025) yang membahas optimalisasi peran pemerintah desa dalam menghadapi persoalan ketersediaan air pada musim kemarau. Demikian pula penelitian Haryo Praseno dan Mahendra (2021) menunjukkan pentingnya keterlibatan pemerintah desa dalam konteks penanggulangan kekeringan. Dalam penelitian ini, keterlibatan tersebut memperoleh dimensi tambahan karena tuntutan masyarakat terhadap Kepala Desa tidak selalu sebanding dengan kewenangan teknis yang tersedia pada tingkat desa.

Kondisi tersebut menimbulkan kesenjangan antara harapan peran dan kapasitas pelaksanaan peran. Petani dapat berharap agar pemerintah desa mampu menjamin ketersediaan atau kelancaran air, sedangkan secara kelembagaan pemerintah desa tidak memiliki kendali penuh terhadap keseluruhan jaringan irigasi. Sebagian jaringan dan pengelolaannya melibatkan kewenangan serta institusi di luar pemerintah desa. Dengan demikian, belum terpenuhinya seluruh harapan masyarakat tidak serta-merta menunjukkan bahwa Kepala Desa tidak menjalankan perannya, tetapi dapat pula disebabkan oleh adanya ketidaksesuaian antara besarnya ekspektasi sosial dan terbatasnya kewenangan formal yang dimiliki.

Temuan ini memberikan penjelasan yang lebih dalam terhadap dimensi patokan. Patokan peran Kepala Desa dalam penanggulangan kekeringan terbentuk dari dua sumber yang tidak selalu sepenuhnya selaras, yaitu norma dan kewenangan formal pemerintahan di satu sisi serta ekspektasi praktis masyarakat di sisi lain. Kajian Widiarto et al. (2023) mengenai pengaturan pengelolaan sumber daya air pertanian di tingkat desa juga menunjukkan relevansi aspek kelembagaan dan pengaturan dalam pengelolaan air pertanian. Dalam konteks Pusakajaya Utara,

kejelasan pembagian peran antarlembaga menjadi penting agar masyarakat dapat memahami ruang tanggung jawab pemerintah desa dan ruang kewenangan instansi teknis lainnya. Oleh karena itu, penguatan peran Kepala Desa tidak cukup dilakukan dengan memperbesar tuntutan terhadap pemerintah desa, tetapi memerlukan kejelasan koordinasi, pembagian kewenangan, dan mekanisme tindak lanjut antaraktor.

Temuan ini relevan dengan kajian Motsumi et al. (2023) mengenai *drought governance* yang menempatkan persoalan kekeringan dalam konteks hubungan tata kelola lintas tingkat. Relevansi yang sama juga terlihat dalam kajian Rondhi et al. (2025) mengenai *network governance* dalam pengelolaan air pedesaan untuk menghadapi dampak perubahan iklim. Dalam konteks penelitian ini, keberhasilan penanganan kekeringan tidak semata-mata bergantung pada kinerja satu aktor lokal, tetapi pada hubungan antara pemerintah desa, petani, P3A, kelompok tani, pemerintah kecamatan, dan lembaga teknis yang berkaitan dengan jaringan irigasi. Oleh karena itu, keterbatasan hasil penanganan tidak hanya mencerminkan keterbatasan tindakan Kepala Desa, tetapi juga keterbatasan koordinasi pada sistem pengelolaan air yang lebih luas.

3. Paparan

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Desa Pusakajaya Utara, diketahui bahwa penanganan kekeringan diawali dengan menerima informasi atau laporan dari petani maupun kelompok tani mengenai kondisi kekurangan air yang terjadi di lahan pertanian. Setelah menerima laporan tersebut, pemerintah desa melakukan peninjauan lapangan untuk mengetahui kondisi yang sebenarnya, kemudian berkoordinasi dengan kelompok tani, P3A, dan pihak terkait guna menentukan langkah penanganan yang diperlukan. Penanganan kekeringan di Desa Pusakajaya Utara melibatkan berbagai pihak yang memiliki peran berbeda sesuai tugas dan kewenangannya masing-masing. Pemerintah desa berperan sebagai koordinator, sedangkan kelompok tani, P3A, penyuluh pertanian, masyarakat, pemerintah kecamatan, serta instansi terkait berperan dalam mendukung pelaksanaan penanganan di lapangan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa keterlibatan berbagai pihak telah membantu pelaksanaan penanganan kekeringan, terutama dalam kegiatan pemeliharaan saluran irigasi, pengaturan distribusi air, pendampingan petani, pembangunan turap, serta normalisasi saluran irigasi menggunakan alat berat beko yang dipinjam dari BLUPPB Karawang. Keterlibatan tersebut menunjukkan bahwa penanganan kekeringan memerlukan kerja sama lintas pihak karena pemerintah desa memiliki keterbatasan sumber daya dan kewenangan dalam menangani seluruh permasalahan secara mandiri.

Namun demikian, hasil wawancara dengan petani menunjukkan bahwa koordinasi antar pihak masih menghadapi beberapa kendala. Sebagian petani menilai bahwa proses penanganan terkadang memerlukan waktu yang cukup lama

karena harus melalui koordinasi dengan berbagai pihak yang terlibat. Selain itu, penyampaian informasi kepada petani juga belum selalu diterima secara merata oleh seluruh masyarakat.

Temuan tersebut relevan dengan kajian Rondhi et al. (2025) mengenai *network governance* dalam pengelolaan air pedesaan. Dalam pendekatan tersebut, persoalan pengelolaan air tidak hanya diselesaikan melalui hubungan hierarkis antara pemerintah dan masyarakat, tetapi memerlukan jaringan interaksi antarpengguna air dan institusi pengelola. Hal yang sama terlihat di Desa Pusakajaya Utara, karena pemerintah desa tidak memiliki seluruh sumber daya maupun kewenangan untuk menyelesaikan permasalahan secara mandiri. Ketergantungan antarlembaga menyebabkan efektivitas penanganan kekeringan sangat ditentukan oleh kemampuan membangun hubungan kerja yang fungsional di antara aktor-aktor tersebut.

Keterlibatan P3A dan kelompok tani juga menunjukkan pentingnya kelembagaan masyarakat dalam pengelolaan irigasi. Hal tersebut relevan dengan kajian Israwati et al. (2024) mengenai peran kelembagaan Perkumpulan Petani Pemakai Air dalam sistem irigasi usaha tani padi. Dalam konteks Pusakajaya Utara, P3A dan kelompok tani menjadi aktor yang memiliki kedekatan langsung dengan kondisi jaringan serta kebutuhan petani, sedangkan pemerintah desa memiliki kemampuan administratif dan koordinatif untuk membawa persoalan tersebut ke ruang pemerintahan yang lebih luas. Interaksi antara kedua jenis aktor tersebut menjadi penting karena persoalan distribusi air memiliki dimensi teknis sekaligus sosial.

Namun demikian, penelitian ini juga menunjukkan bahwa keberadaan banyak aktor dapat menghasilkan tantangan tersendiri. Koordinasi yang harus melewati beberapa pihak berpotensi memperpanjang proses respons, sementara informasi mengenai langkah penanganan belum selalu diterima secara merata oleh petani. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa *network governance* tidak secara otomatis menghasilkan tata kelola yang efektif. Jaringan antarlembaga tetap memerlukan mekanisme komunikasi yang jelas, pembagian peran, kecepatan respons, serta saluran penyampaian informasi yang dapat diakses masyarakat.

4. Sanksi

Berdasarkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi, diketahui bahwa pemerintah Desa Pusakajaya Utara telah memberikan berbagai imbauan dan aturan kepada masyarakat terkait pengelolaan irigasi. Imbauan tersebut bertujuan menjaga kelancaran distribusi air, memelihara kondisi saluran irigasi, serta mendorong penggunaan air secara tertib terutama pada saat musim kemarau.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa keberadaan imbauan dan aturan telah diketahui oleh sebagian besar masyarakat petani. Namun demikian, tingkat kepatuhan masyarakat masih belum sepenuhnya merata. Hal tersebut terlihat dari masih ditemukannya sampah, tumbuhan liar, maupun penyumbatan pada beberapa

bagian saluran irigasi. Selain itu, beberapa petani mengungkapkan bahwa informasi terkait aturan pengelolaan irigasi belum selalu diterima secara merata oleh seluruh masyarakat.

Menurut analisis peneliti, imbauan dan aturan yang diberikan pemerintah desa telah menunjukkan adanya upaya untuk membentuk perilaku masyarakat agar lebih peduli terhadap pengelolaan irigasi. Akan tetapi, efektivitas imbauan tersebut masih dipengaruhi oleh tingkat kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam menjaga saluran irigasi. Oleh karena itu, diperlukan penyampaian informasi yang lebih intensif dan berkelanjutan agar pemahaman serta kepatuhan masyarakat terhadap aturan pengelolaan irigasi dapat meningkat.

Adapun upaya yang dilakukan pemerintah Desa Pusakajaya Utara berupaya meningkatkan kepatuhan masyarakat terhadap aturan pengelolaan irigasi melalui pendekatan persuasif berupa imbauan, sosialisasi, musyawarah, dan kegiatan gotong royong. Pendekatan tersebut dipilih untuk membangun kesadaran masyarakat agar ikut menjaga saluran irigasi dan menggunakan air secara tertib.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya tersebut telah dilaksanakan secara berkelanjutan melalui kerja sama antara pemerintah desa, kelompok tani, P3A, dan penyuluh pertanian. Akan tetapi, tingkat kepatuhan masyarakat masih belum sepenuhnya merata. Hal ini terlihat dari masih ditemukannya saluran irigasi yang kurang terawat serta adanya keluhan terkait penggunaan dan pembagian air pada saat musim kemarau.

Dalam perspektif teori Peran Suhardono, sanksi merupakan konsekuensi yang berkaitan dengan pelaksanaan atau penyimpangan terhadap tuntutan suatu peran. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kepala Desa, kelompok tani, dan P3A lebih memilih mekanisme pembinaan untuk mendorong kepatuhan masyarakat terhadap aturan pengelolaan irigasi. Pendekatan tersebut memiliki relevansi dengan karakter hubungan sosial masyarakat desa yang cenderung menempatkan musyawarah, gotong royong, dan hubungan kekeluargaan sebagai mekanisme penting dalam menyelesaikan persoalan bersama. Dengan demikian, legitimasi sosial menjadi salah satu instrumen pengendalian perilaku masyarakat.

Keterlibatan P3A dalam mekanisme tersebut juga menegaskan pentingnya lembaga pengguna air dalam pembentukan kepatuhan. Kajian Israwati et al. (2024) mengenai kelembagaan P3A pada sistem irigasi usaha tani padi memberikan konteks yang relevan terhadap posisi kelembagaan petani dalam pengelolaan irigasi. Di sisi lain, kajian Widiarto et al. (2023) mengenai penyusunan peraturan desa dalam pengelolaan sumber daya air pertanian memperlihatkan relevansi aspek pengaturan dalam membangun tata kelola sumber daya air di tingkat desa. Dalam penelitian ini, pengendalian perilaku masih lebih dominan bertumpu pada kesepakatan dan pendekatan sosial dibandingkan mekanisme formal.

Pendekatan persuasif memiliki kelebihan karena dapat menjaga hubungan sosial dan mengurangi potensi konflik antarmasyarakat. Akan tetapi, hasil

penelitian menunjukkan bahwa pendekatan tersebut juga memiliki keterbatasan ketika tidak diikuti dengan pengawasan dan penerapan konsekuensi secara konsisten. Masih ditemukannya sampah, tumbuhan liar, penyumbatan saluran, serta ketidakmerataan partisipasi masyarakat menunjukkan bahwa keberadaan imbauan belum selalu mampu menghasilkan kepatuhan yang berkelanjutan. Dengan kata lain, norma sosial akan kehilangan daya pengendali apabila pelanggaran tidak menghasilkan konsekuensi yang jelas dan konsisten.

Temuan ini juga dapat dikaitkan dengan Akbar (2022) yang menekankan pentingnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur irigasi. Partisipasi dalam konteks penelitian ini tidak cukup dimaknai sebagai kehadiran masyarakat dalam kegiatan gotong royong, tetapi juga sebagai kesediaan untuk mematuhi aturan bersama, menjaga kebersihan saluran, dan menggunakan air dengan mempertimbangkan kepentingan pengguna lainnya. Oleh karena itu, peningkatan partisipasi perlu disertai dengan penguatan tanggung jawab kolektif.

Kesimpulan

Penelitian ini menunjukkan bahwa Kepala Desa Pusakajaya Utara telah menjalankan perannya dalam menanggulangi kekeringan pada lahan pertanian sawah melalui koordinasi dengan kelompok tani, Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A), penyuluh pertanian, serta instansi terkait, disertai dengan upaya mendorong partisipasi masyarakat dalam pemeliharaan saluran irigasi. Berdasarkan analisis menggunakan teori Peran Suhardono, pelaksanaan peran tersebut telah tercermin pada dimensi aksi, patokan, penilaian, paparan, dan sanksi. Namun, efektivitas pelaksanaannya belum sepenuhnya optimal karena dipengaruhi oleh keterbatasan kewenangan pemerintah desa dalam pengelolaan jaringan irigasi, kondisi geografis Desa Pusakajaya Utara sebagai wilayah hilir, serta perlunya penguatan koordinasi antar pemangku kepentingan dalam pengelolaan sumber daya air. Secara teoritis, penelitian ini memperkuat penggunaan teori Peran Suhardono dalam menganalisis pelaksanaan peran Kepala Desa pada konteks penanggulangan kekeringan di tingkat desa. Temuan penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan peran pemerintah desa tidak hanya ditentukan oleh tindakan yang dilakukan, tetapi juga dipengaruhi oleh kesesuaian kewenangan, pola koordinasi, evaluasi pelaksanaan program, serta mekanisme pembinaan masyarakat. Dengan demikian, teori Peran Suhardono dapat digunakan sebagai kerangka analisis yang komprehensif untuk memahami dinamika pelaksanaan peran pemerintah desa dalam menghadapi permasalahan publik.

Dari sisi praktis, hasil penelitian ini memberikan implikasi bahwa penanggulangan kekeringan di tingkat desa memerlukan penguatan kolaborasi antara pemerintah desa, kelompok tani, P3A, pemerintah daerah, dan instansi teknis yang berwenang di bidang irigasi. Selain itu, pemerintah desa perlu meningkatkan

koordinasi, komunikasi, serta pemberdayaan masyarakat dalam menjaga saluran irigasi agar upaya penanggulangan kekeringan dapat berjalan lebih efektif dan berkelanjutan. Penelitian ini memiliki keterbatasan karena hanya dilakukan pada satu desa dengan pendekatan kualitatif sehingga hasil penelitian belum dapat digeneralisasikan untuk seluruh wilayah yang memiliki karakteristik berbeda. Selain itu, penelitian ini lebih berfokus pada peran pemerintah desa dalam penanggulangan kekeringan dan belum mengkaji secara mendalam aspek kebijakan pengelolaan irigasi dari pemerintah daerah maupun pengaruh perubahan iklim terhadap keberlanjutan sistem irigasi. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya disarankan untuk melakukan studi komparatif pada beberapa desa dengan karakteristik wilayah yang berbeda serta mengintegrasikan perspektif tata kelola kolaboratif dan adaptasi perubahan iklim agar diperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai penanggulangan kekeringan di sektor pertanian.

Referensi

- Akbar, F., Haswir, & Fauzi, A. (2022). Peran pemerintah desa dalam meningkatkan pembangunan desa menurut perspektif fiqh siyasah. *Jurnal Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau*, 1(2), 118–142.
- Amanu, D., Utami, N. S., & Isnaeni, D. (2025). Synergy of village consultative body and village head toward good governance. *Academia Open*, 10(2). doi:10.21070/acopen.10.2025.12746
- Ardiputra, S., Milyan, M., Akhmad, Z., Sulthan, M., & Ardiputra, M. A. (2025). Optimizing budget policy in village fund allocation (ADD): A governance and public administration perspective on rural development. *Frontiers in Political Science*, 7, 1581806. doi:10.3389/fpos.2025.1581806
- Arditama, E., & Atmojo, D. P. (2025). Irrigation management from good governance perspective in Wegil Village, Pati Regency. *KnE Social Sciences*, 10(10), 168–176. doi:10.18502/kss.v10i10.18659
- Ariyanti, O., Setiawan, C., & A'Rachman, F. R. (2022). Evaluasi kesesuaian lahan tanaman padi sawah di Desa Weninggalih Kecamatan Jonggol Kabupaten Bogor. *Jurnal Spatial Wahana Komunikasi dan Informasi Geografi*, 22(1), 1–12. doi:10.21009/spatial.221.3
- Bramantyo, R. Y., & Windradi, F. (2022). Peran kepala desa, perangkat desa dan lembaga musyawarah masyarakat desa dalam kedudukannya sebagai pemerintah desa terhadap perencanaan pembangunan desa. *Transparansi Hukum*, 5(1), 152–167. doi:10.30737/transparansi.v5i1.3632
- Darma, R., O'Connor, P., Akzar, R., Tenriawaru, A. N., & Amandaria, R. (2025). Enhancing sustainability in rice farming: Institutional responses to floods and droughts in pump-based irrigation systems in Wajo District, Indonesia. *Sustainability*, 17(8), 3501. doi:10.3390/su17083501

- Dirwanto, & Bahtiar, R. (2023). Analisis peran subsidi dalam pengelolaan air irigasi pada daerah dataran rendah di Desa Plumbon Kabupaten Indramayu. *Risalah Kebijakan Pertanian dan Lingkungan*, 10(1), 47–61. doi:10.29244/jkebijakan.v10i1.35375
- Haryo Praseno, R. R., & Mahendra, G. K. (2021). Peran pemerintah Desa Hargomulyo Kecamatan Kokap Kabupaten Kulon Progo dalam penanggulangan bencana kekeringan. *Caraka Prabu: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 5(1), 114–126. doi:10.36859/jcp.v5i1.417
- Israwati, I., Nikoyan, A., & Arimbawa, P. (2024). Persepsi petani dan peran kelembagaan Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) pada sistem irigasi usahatani padi di Desa Sindangkasih Kecamatan Ranomeeto Barat Kabupaten Konawe Selatan. *Jurnal Ilmiah Penyuluhan dan Pengembangan Masyarakat*, 4(3).
- Magdalene Jason, T., Arul, C., Respina Bakthasingh, M., & Parthipan, V. (2025). Sustainability of irrigation practices and water-pricing tools in water-stressed tropical countries: A way forward for sustainable water governance. *AgroEnvironmental Sustainability*, 2(4), 216–233. doi:10.59983/s2024020407
- Kurniatin, P. R. E., & Maksum, I. R. (2022). Rural water governance: Governance model for fulfilling rural drinking water needs in Indonesia. *Publikauma: Jurnal Administrasi Publik Universitas Medan Area*, 10(1), 39–48. doi:10.31289/publika.v10i1.7229
- Liesky, A. (2024). *Peranan ketua kelompok tani dalam penerapan system of rice intensification (SRI) dan produktivitas padi sawah di Desa Sidosari Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan* (Skripsi sarjana). Universitas Lampung.
- Nindita, A., Falatehan, S. F., Aries, M., Nurdinawati, D., & Sholichin, S. (2026). Peningkatan resiliensi kelompok petani padi terhadap banjir melalui pemilihan varietas di Desa Ciuyah Kabupaten Cirebon. *Agrokreatif: Jurnal Ilmiah Pengabdian kepada Masyarakat*, 12(1), 1–13. doi:10.29244/agrokreatif.12.1.1-13
- Nupus, H., Nurjannah, S., & Kusuma, N. (2024). Kerentanan sosial dan strategi bertahan hidup petani tadah hujan di Desa Segala Anyar Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah. *Prosiding Seminar Nasional Mahasiswa Sosiologi*, 2(2), 14–43.
- Omari-Motsumi, K., Ziervogel, G., & New, M. (2023). Drought governance: A cross-level governance analysis in Botswana. *Climate Risk Management*, 42, 100557. doi:10.1016/j.crm.2023.100557
- Phali, L., Naidoo, D., & Mudhara, M. (2025). The linkages between water security, conflict, participation, and governance in smallholder irrigation schemes in KwaZulu-Natal, South Africa: A partial least squares structural equation modelling approach. *Frontiers in Water*, 7, 1575169. doi:10.3389/frwa.2025.1575169
- Rahman, D. F., Fauzi, L. M., & Zulfikar, W. (2025). Peran pemerintah desa dalam menanggulangi bencana kekeringan di Desa Kembang Kuning Kecamatan

- Jatiluhur Kabupaten Purwakarta. *Praxis Idealist: Jurnal Mahasiswa Ilmu Pemerintahan*, 1(2). doi:10.36859/jp.v1i2.3182
- Rahman, N., Yuniasih, A. W., & Nurlaela, S. (2024). Peran badan usaha milik desa dalam mendukung ketahanan pangan dan pembangunan perekonomian masyarakat. *Jurnal Penyuluhan Pertanian*, 19(2), 140–151. doi:10.51852/jpp.v19i2.678
- Rondhi, M., Hadi, S., Imanuddin, M., Mori, Y., Kondo, T., Rokhani, R., . . . Firdaus, N. A. (2025). Network governance of rural water management to cope with adverse impact of climate change: Evidence from an irrigated dry area in Central Java, Indonesia. *Caraka Tani: Journal of Sustainable Agriculture*, 40(2), 251–265. doi:10.20961/carakatani.v40i2.91715
- Sari, C., Fandidarma, B., & Solikin, N. (2020). Pompa air harapan: Upaya penanggulangan kekeringan dan pengembangan usaha mandiri masyarakat Desa Kwadungan Lor Kabupaten Ngawi. *Warta Pengabdian*, 14(3), 164–172. doi:10.19184/wrtp.v14i3.16958
- Suryandari, H., & Isbandono, P. (2025). Optimalisasi peran pemerintah desa dalam mengatasi krisis air bersih akibat musim kemarau di Kecamatan Sukosewu Desa Sumberjokidul Kabupaten Bojonegoro. *Inovant*, 3(2), 184–193.
- Wahid, A., Mardiah, A., & Hasdinawati. (2026). Manajemen kekeringan berbasis desa: Strategi Pemerintah Desa Aska dalam siklus penanggulangan bencana. *PERSEPTIF: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, 4(2), 221–238. doi:10.70716/perseptif.v4i2.552
- Wahyunengseh, R. D., & Pamungkas, D. B. (2025). Disaster-resilient village governance: A public administration perspective on social ecological resilience. *Jurnal Ilmu Lingkungan*, 23(4), 887–895. doi:10.14710/jil.23.4.887-895
- Widiarto, A. E., Fadli, M., Rahmawan, T. I., Putra, M. D., Al-Fatih, S., & Wibowo, A. M. (2023). The drafting of village regulations concerning the management of agricultural water resources. *Journal of Community Service and Empowerment*, 4(1), 18–24. doi:10.22219/jcse.v4i1.23906
- Wulandari, M. M. (2025). Perlindungan hukum terhadap petani padi dalam perubahan iklim sebagai strategi peningkatan ketahanan ekonomi di Banyumas. *Law, Development and Justice Review*, 8(1), 85–105. doi:10.14710/ldjr.8.2025.85-105